

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian tahun 2013 sampai dengan 2015. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 86. Adapun prosedur pemilihan sampel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Prosedur Pemilihan Sampel

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Total
1	Perusahaan manufaktur yang <i>listed</i> di BEI	138	143	143	424
2	Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel (tidak terdapat semua variabel independen dan tidak menerbitkan laporan tahunan)	(98)	(103)	(103)	(304)
3	Total perusahaan yang dijadikan sampel	40	40	40	120
4	Data <i>outliers</i>	13	11	10	(34)
	Total <i>sample</i> perusahaan yang diteliti	27	29	30	86

Perusahaan yang sesuai dengan kriteria penelitian selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 40 perusahaan per tahunnya, dengan 3 tahun penelitian maka total sampel yang diteliti sebanyak 120. Ditemukan data yang *outliers*

sebanyak 34 sampel pada 3 tahunnya, sehingga sampelyang diteliti selama 3 tahun sebanyak 86 sampel.

B. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standar deviation*) dari variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 4.2
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KM	86	,00	89,79	8,6195	15,95903
KI	86	1,93	93,06	47,5181	25,51612
PRKI	86	25,00	66,67	38,5391	8,69288
JRDK	86	1,00	32,00	6,9186	6,56231
JADK	86	2,00	8,00	3,9884	1,50680
JAKA	86	2,00	5,00	3,1163	,54056
MANDSC R	86	60,27	76,71	67,8528	3,87892
Valid N (listwise)	86				

Berdasarkan tabel 4.2 dengan total 86 *sample* dapat diketahui bahwa variabel *mandatory disclosure* (MANDSCR) memiliki nilai minimum sebesar 60,27%; nilai maksimum sebesar 76,71% nilai rata-rata (*mean*) sebesar 67,8528% dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 3,87892%.

Variabel kepemilikan manajerial (KM) memiliki nilai minimum 0,003%; nilai maksimum sebesar 89,79% nilai rata-rata (*mean*) 8,6195%; dan simpang baku (*standar deviation*) sebesar 15,95903%. Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai minimum 1,93%; nilai maksimum sebesar 93,06%; nilai rata-rata (*mean*) 47,5181%; dan simpang baku (*standar deviation*) sebesar 25,51612%. Variabel proporsi komisaris independen (PRKI)

memiliki nilai minimum 25,00%; nilai maksimum sebesar 66,67%; nilai rata-rata (*mean*) 38,5391%; dan simpang baku (*standar deviation*) sebesar 8,69288%. Variabel jumlah rapat dewan komisaris (JRDK) memiliki nilai minimum 1,00; nilai maksimum sebesar 32,00; nilai rata-rata (*mean*) 6,9186 atau 7 pertemuan; dan simpang baku (*standar deviation*) sebesar 6,56231 atau 7. Variabel jumlah anggota dewan komisaris (JADK) memiliki nilai minimum 2,00; nilai maksimum sebesar 8,00; nilai rata-rata (*mean*) 3,9884 atau 4 anggota ; dan simpang baku (*standar deviation*) sebesar 1,50680. Variabel jumlah anggota komite audit (JAKA) memiliki nilai minimum 2,00; nilai maksimum sebesar 5,00; nilai rata-rata (*mean*) 3,1163 atau 3 anggota; dan simpang baku (*standar deviation*) sebesar 0,54056.

C. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik digunakan untuk melihat kualitas data yang digunakan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.3 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,67739939
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,067
Kolmogorov-Smirnov Z		,726
Asymp. Sig. (2-tailed)		,667

Berdasarkan Tabel 4.3 didapatkan hasil bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,667 > \alpha (0,05)$. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan menggunakan *sample* dari perusahaan manufaktur berdistribusi normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah antara variabel pengganggu masing-masing variabel saling mempengaruhi dalam model regresi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *DW (Durbin-Watson)* yaitu $dU < dW < 4-dU$. Nilai *dU* diperoleh dari tabel pembandingan. Hasil dari analisis bisa dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,318(a)	,101	,033	3,81449	2,154

Berdasarkan Tabel 4.4 didapatkan hasil bahwa nilai DW sebesar 2,154. Nilai antara $dU < dW < 4-dU$, modelnya yaitu $1,8010 < 2,154 < 2,199$ menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan *sample* dari perusahaan manufaktur tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara variabel independen pada model regresi. Uji multikolinearitas melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) jika nilai tolerance menunjukkan angka $> 0,1$ dan *variance inflation factor* menunjukkan angka < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dalam Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
KM	0,810	1,234	Tidak terdapat multikolinearitas
KI	0,750	1,333	Tidak terdapat multikolinearitas
PRKI	0,729	1,372	Tidak terdapat multikolinearitas
JRDK	0,883	1,132	Tidak terdapat multikolinearitas
JADK	0,814	1,228	Tidak terdapat multikolinearitas
JAKA	0,874	1,144	Tidak terdapat multikolinearitas

Berdasarkan tabel 4.4. menunjukkan nilai *tolerance* semua variabel independen diatas 10% atau diatas 0,01 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) semua variabel independen kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	B	Sig.	Kesimpulan
KM	0,001	0,963	Tidak terdapat heteroskedastisitas
KI	0,019	0,056	Tidak terdapat heteroskedastisitas
PRKI	0,010	0,741	Tidak terdapat heteroskedastisitas
JRDK	0,004	0,915	Tidak terdapat heteroskedastisitas
JADK	-0,110	0,494	Tidak terdapat heteroskedastisitas
JAKA	0,244	0,570	Tidak terdapat heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini lebih besar dari α (0,05). Kepemilikan manajerial (KM) sebesar 0,963; kepemilikan institusional sebesar 0,056; proporsi komisaris independen (PRKI) sebesar 0,741; jumlah rapat dewan komisaris (JRDK) sebesar 0,915; jumlah anggota dewan komisaris (JADK) sebesar 0,494; jumlah anggota komite audit (JAKA) sebesar 0,572. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Metode analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan

menggunakan program SPSS 15.0. pengujian hipotesis ini meliputi tiga bagian yaitu nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*), nilai statistik F dan nilai statistik *t*.

1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,318(a)	,101	,033	3,81449

Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah 0,033 atau 3,3%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia sebesar 3,3% yang dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan manajerial (KM), kepemilikan institusional (KI), proporsikomisaris independen (PRKI), jumlah rapat dewan komisaris (JRDK), jumlah anggota dewan komisaris (JADK), dan jumlah anggota komite audit (JAKA). Sisanya 96,7% (100%-3,3%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji signifikan simultan (Uji F) bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-

sama terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Hasil uji signifikan simultan (Uji F) ditunjukkan pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	129,433	6	21,572	1,483	,195(a)
	Residual	1149,478	79	14,550		
	Total	1278,911	85			

Berdasarkan Tabel 4.8 didapatkan hasil bahwa nilai F sebesar 1,483 dengan nilai signifikan sebesar $0,195 > \alpha (0,05)$. Jadi, variabel independen (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsikomisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota dewan komisaris, dan jumlah anggota komite audit) tidak berpengaruh simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (*mandatory disclosure*).

3. Uji Parsial (Uji *t*)

Uji parsial (Uji *t*) bertujuan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Hasil uji parsial (Uji *t*) dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	64,049	2,991		21,416	,000
KM	,000	,029	,001	,011	,991
KI	-,013	,019	-,088	-,717	,475
PRKI	,114	,056	,256	2,046	,044
JRDK	-,149	,067	-,252	-2,217	,029
JADK	-,138	,304	-,054	-,453	,652
JAKA	,521	,819	,073	,636	,527

Hasil analisis regresi berganda yang ditunjukkan pada tabel 4.9 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{MANDSCR} = 64,049 + 0,000(\text{KM}) - 0,013(\text{KI}) + 0,114(\text{PRKI}) - 0,149(\text{JRDK}) - 0,138(\text{JADK}) + 0,521(\text{JAKA}) + e$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian:

a. Kepemilikan manajerial terhadap *mandatory disclosure*

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan kepemilikan manajerial memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,000, dengan signifikansi sebesar 0,991 > alpha (0,05) sehingga kepemilikan manajerial tidak memiliki korelasi terhadap *mandatory disclosure*. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berkorelasi dan memiliki nilai positif terhadap *mandatory disclosure* di Indonesia tidak berhasil didukung.

b. Kepemilikan institusional terhadap *mandatory disclosure*

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan kepemilikan institusional nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,013 dengan signifikansi

sebesar $0,475 > \alpha (0,05)$ sehingga kepemilikan institusional tidak berkorelasi terhadap *mandatory disclosure*. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berkorelasi dan memiliki nilai positif terhadap *mandatory disclosure* di Indonesia tidak berhasil didukung.

c. Proporsi komisaris independen terhadap *mandatory disclosure*

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan proporsi komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,114, dengan signifikansi sebesar $0,044 < \alpha (0,05)$ sehingga proporsi komisaris independen berkorelasi positif terhadap *mandatory disclosure*. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berkorelasi dan memiliki nilai positif terhadap *mandatory disclosure* di Indonesia berhasil didukung.

d. Jumlah rapat dewan komisaris terhadap *mandatory disclosure*

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan jumlah rapat dewan komisaris nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,149 dengan signifikansi sebesar $0,029 < \alpha (0,05)$ sehingga jumlah rapat dewan komisaris berhubungan negatif terhadap *mandatory disclosure*. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) yang menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berkorelasi dan memiliki nilai positif terhadap *mandatory disclosure* di Indonesia tidak berhasil didukung.

e. Jumlah anggota dewan komisaris terhadap *mandatory disclosure*

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,138 dengan signifikansi sebesar $0,625 > \alpha (0,05)$ sehingga jumlah anggota dewan komisaris tidak berhubungan terhadap *mandatory disclosure*. Dengan demikian hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berkorelasi dan memiliki nilai positif terhadap *mandatory disclosure* di Indonesia tidak berhasil didukung.

f. Jumlah anggota komite audit terhadap *mandatory disclosure*

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan jumlah anggota komite audit nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,521 dengan signifikansi sebesar $0,527 > \alpha (0,05)$ sehingga jumlah anggota komite audit tidak berhubungan terhadap *mandatory disclosure*. Dengan demikian hipotesis keenam (H6) yang menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit berkorelasi dan memiliki nilai positif terhadap *mandatory disclosure* di Indonesia tidak berhasil didukung.

Secara keseluruhan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel

4.10.

Tabel 4.10
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> IFRS	Ditolak
H ₂	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i>	Ditolak

	IFRS	
H ₃	Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> IFRS	Diterima
H ₄	Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> IFRS	Ditolak
H ₅	Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> IFRS	Ditolak
H ₆	Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> IFRS	Ditolak

E. Pembahasan

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan kepemilikan manajerial memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,000, dengan signifikansi sebesar $0,991 > \alpha (0,05)$ sehingga kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure*.

Hal ini diduga karena berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat bahwa total kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan di Indonesia relatif kecil sehingga belum terdapat keserasian kepentingan antar pemilik dan manajer. Manajer yang memiliki kebebasan yang baik dalam mengakses informasi pihak internal dibandingkan dengan pihak eksternal. Apabila kepemilikan saham perusahaan dominan pada manajerial maka perusahaan tidak akan menyediakan informasi bagi publik karena pihak yang dominan bukan publik tetapi pihak internal perusahaan. Konsentrasi kepemilikan pada pihak manajemen tidak dapat menjamin manajemen untuk melakukan

pengungkapan karena tuntutan informasi relatif rendah dibandingkan konsentrasi kepemilikan pihak eksternal (Akhtaruddin, 2008 dalam Alvionita, dkk 2015). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa adanya kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan tidak dapat menjamin untuk meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Fajriansyah (2013) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Akan tetapi tidak mendukung penelitian Utami, dkk (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS.

2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Kepemilikan institusional dapat membantu dalam memonitor kinerja yang dilakukan manajemen. Kepemilikan institusional yang besar akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intensif. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung terhadap besarnya investasi yang dilakukan.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi arahnya negatif sebesar -0,013 dengan signifikansi sebesar $0,475 > \alpha (0,05)$ sehingga kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis kedua. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulan (2013) yang juga menemukan bahwa

kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hal ini disebabkan karena pihak institusi sebagai pemilik tidak begitu memperhatikan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* yang dilakukan perusahaan tetapi lebih memperhatikan informasi-informasi yang penting untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Selain itu, pihak institusi sebagai pemilik merasa tidak bertanggung jawab terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib karena hanya menggunakan hasil akhir dari laporan keuangan dan bukan sebagai pembuat laporan keuangan.

3. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Proporsi dewan komisaris memiliki tugas utama yaitu untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pembuatan serta pelaksanaan kebijakan di perusahaan, proporsi dewan komisaris yang efektif berada pada rentang lebih dari lima orang dan kurang dari empat belas orang. Peran dewan komisaris diharapkan mampu mengawasi kinerja *CEO* yang akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan. Baiknya kualitas laporan yang disajikan maka akan meningkatkan transparansi dalam pengungkapan.

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan proporsi komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,114, dengan signifikansi sebesar $0,044 < \alpha (0,05)$ sehingga proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure*. Dengan besarnya proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan

maka proses penjagaan serta pengawan yang dilakukan makin berkualitas dengan banyaknya jumlah pihak independen dalam perusahaan yang mendesak adanya keterbukaan dan kejelasan dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007). Adanya komisaris independen mempunyai tugas serta tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dalam hal transparansi kepada publik sehingga perusahaan cenderung mematuhi peraturan yang sudah ada.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Prawinandi, dkk (2012) dan Widjayanti dan Wahidawati (2015) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berkorelasi positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

4. Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berkorelasi negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Variabel jumlah rapat dewan komisaris (JRDK) nilai koefisien regresi arahnya negatif sebesar -0,149 dan nilai signifikansi 0,029 yang lebih kecil dari 0,050. Dengan demikian disimpulkan bahwa variabel jumlah rapat dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Kesadaran perusahaan untuk melakukan pengungkapan wajib bukan berdasarkan tinggi rendahnya intensitas rapat dewan komisaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya intensitas rapat dewan

komisaris bukan pertimbangan untuk tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Kemungkinan hasil rapat belum secara maksimal dipakai untuk kepentingan perusahaan. Selain itu, seringkali terdapat seorang atau lebih dewan komisaris yang mendominasi kepentingan rapat dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan, padahal proses rapat sangat penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris (Muntoro, 2006 dalam Utami, dkk 2012).

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk (2012), Supriyono, dkk (2012), Pitasari dan Septiani (2015) dan Widjayantidan wahidawati (2015) yang mengatakan jumlah rapat dewan komisaris tidak berkorelasi terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

5. Pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Variabel jumlah anggota dewan komisaris mempunyai nilai sig 0,652 > α (0,05) dan arah koefisien regresi negatif -0,138, artinya jumlah anggota dewan komisaris tidak berkorelasi positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Jumlah anggota dewan komisaris tidak berkorelasi signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* karena total anggota dewan komisaris yang banyak dapat mengakibatkan proses mendapatkan kesepakatan serta pengambilan keputusan menjadi sulit, panjang dan

bertele-tele, sedangkan total anggota yang minim menyebabkan dewan komisaris tidak dapat memberikan tekanan kepada dewan direksi (Muntoro, 2005 dalam Prawinandi, dkk 2012) oleh sebab itu tidak dapat memotivasi perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi wajib yang lebih maksimal.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi, dkk (2012) dan Pitasari dan Septiani (2015). Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa, semakin besarnya jumlah anggota dewan komisaris akan mengakibatkan proses mendapatkan kesepakatan dan pengambilan keputusan menjadi rumit. Sehingga tidak dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure*.

6. Pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Variabel jumlah anggota komite audit (JAKA) dengan arah koefisien regresi positif sebesar 0,521 dengan nilai signifikansi 0,527 yang lebih besar dari 0,050. Dengan demikian disimpulkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Hasil pengujian hipotesis enam menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Mandatory disclosure*. Penolakan hipotesis ini diduga karena total anggota komite audit

yang terlalu banyak pada suatu perusahaan maka tingkat komunikasi serta koordinasi dalam komite audit menjadi sulit dilakukan sehingga tugas yang seharusnya dilaksanakan menjadi tidak efektif, terutama dalam pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk membantu dewan komisaris sehingga tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan *mandatory disclosure* yang lebih tinggi.

Adanya komite audit seharusnya mampu memberikan dorongan bagi pihak manajemen dalam mengungkapkan informasi lebih banyak kepada publik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvionita dan Taqwa (2015), Hafiz, dkk (2015) dan Widjayanti dan wahidawati (2015) yang mengatakan jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.